

# KESIAPAN LAMPUNG SEBAGAI PUSAT INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MENGUATKAN PERTAHANAN INDONESIA

Agus Hadiawan<sup>1</sup>, Astiwi Inayah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

<sup>2</sup>) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

---

## ABSTRAK

Pengembangan industri pertahanan adalah salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri perlu ditopang oleh industri pertahanan yang mandiri serta komitmen membangun industri pertahanan yang kuat dan berdaya saing. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan merelokasi sejumlah industri pertahanan strategis ke wilayah Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Lampung yang direncanakan akan menjadi pusat industri pertahanan Indonesia. Kesiapan tersebut dilihat dari aspek pemerintah, masyarakat, maupun wilayah geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kesiapan wilayah, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyarankan dua wilayahnya, yakni register 27 dan 28 sebagai lokasi pembangunan industri pertahanan. Kedua wilayah tersebut dapat digunakan untuk membangun PT. Pindad dan PT. PAL namun tidak cocok untuk membangun PT. Dirgantara Indonesia. Dari segi kesiapan pemerintah, pemerintah pusat telah mensosialisasikan rencana tersebut ke pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, hingga ke tingkat camat dan desa di Tanggamus. Pemda Kabupaten Tanggamus telah bekerjasama dengan berbagai mitra untuk mendukung tercapainya rencana pembangunan industri pertahanan di Tanggamus. Sementara dari segi kesiapan penduduk, masyarakat menyatakan sikap positifnya terhadap rencana pembangunan tersebut dengan syarat bahwa tanah adat milik mereka diganti rugi oleh pemerintah. Selain itu kesiapan penduduk telah didukung melalui kondisi lingkungan yang baik.

**Kata kunci:** Industri Pertahanan, Kesiapan, Lampung, Relokasi

## ABSTRACT

*The development of the defense industry is an important part of protecting national interests. To build an independent defense force, it is necessary to be supported by an independent defense industry and a commitment to build a strong and competitive defense industry. One of the efforts made by the government is to relocate a number of strategic defense industries to the Lampung region. This study aims to determine the readiness of Lampung which is planned to become the center of Indonesia's defense industry. This readiness is seen from the aspects of government, society, and geographic area. This research uses a qualitative approach. The results of the research show that in terms of regional readiness, the Tanggamus Regency government has suggested two areas, namely registers 27 and 28 as locations for defense industry development. Both areas can be used to build PT. Pindad and PT. PAL but not suitable for building PT. Indonesian Aerospace. In terms of government readiness, the central government has socialized the plan to the*

*Lampung provincial government, the Tanggamus district government, to the sub-district and village levels in Tanggamus. The Tanggamus Regency Government has collaborated with various partners to support the achievement of the defense industry development plan at Tanggamus. Meanwhile, in terms of community readiness, the community expressed a positive attitude towards the development plan on the condition that their customary land be compensated by the government. In addition, the readiness of the population has been supported through good environmental conditions.*

**Keywords:** *Defense Industry, Readiness, Lampung, Relocation*

## **PENDAHULUAN**

Untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri perlu ditopang oleh industri pertahanan yang mandiri serta komitmen membangun industri pertahanan yang kuat dan berdaya saing. Pemerintah berpandangan bahwa pertahanan yang kuat membutuhkan industri pertahanan yang kuat. Jika industri pertahanan tidak kuat, pertahanan pun tidak kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan merelokasi sejumlah industri strategis di bidang pertahanan ke wilayah Lampung. Kebijakan pemerintah pusat untuk merelokasi sejumlah industri pertahanan di luar Pulau Jawa merupakan langkah untuk memperkuat industri pertahanan, sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan pembangunan Indonesia secara merata. Prinsip dasarnya adalah untuk membangun pertahanan yang tangguh tidak bisa terpusat, tapi harus disebar.

Di antara industri pertahanan yang akan direlokasi adalah PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, serta PT PAL. Ketiga industri pertahanan yang akan direlokasi tersebut merupakan industri yang sangat penting untuk membangun kemandirian alutsista. PT Dirgantara Indonesia merupakan industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Adapun PT Pindad merupakan perusahaan industri dan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer yang berpusat di Bandung, Jawa Barat dan Malang, Jawa Timur. Produk militer yang dimaksud mulai dari amunisi, senjata serbu dan pistol hingga kendaraan tempur. Sementara PT PAL yang bermarkas di Surabaya memproduksi berbagai jenis kapal perang dan kapal niaga, jasa perbaikan, pemeliharaan kapal, dan rekayasa.

Tanggamus dinilai memiliki sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk pengembangan sejumlah pabrik yang memproduksi alat-alat pertahanan Indonesia,

yang akan dipindahkan ke Lampung. Tanggamus memiliki topografi laut yang dalam sehingga cocok untuk dijadikan kawasan industri pertahanan. Pembangunan industri pertahanan tersebut akan memberikan efek ganda bukan hanya bagi Tanggamus tapi juga daerah di sekitarnya. Pembangunan industri ini akan mengembangkan wilayah Tanggamus dengan memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan lain di Tanggamus seperti UMKM, koperasi, pusat pariwisata bahkan wilayah-wilayah lain sekitar Tanggamus juga akan berkembang.

Penelitian sebelumnya mengenai pembangunan industri pertahanan lebih banyak menyoroti aspek pembangunan industri pertahanan Indonesia saat ini. Penelitian sebelumnya belum banyak membahas tentang rencana pembangunan industri pertahanan Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini semakin menguatkan pentingnya penelitian yang mengkaji tentang rencana pembangunan industri pertahanan Indonesia di masa depan. Salah satunya adalah rencana pembangunan kawasan industri pertahanan nasional di Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Lampung yang direncanakan akan menjadi pusat industri pertahanan nasional. Kesiapan tersebut meliputi tiga hal, yaitu kesiapan wilayah; kesiapan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat; serta kesiapan masyarakat sekitar. Penelitian ini juga dilakukan untuk mendukung program pembangunan industri pertahanan yang kuat dan berdaya saing di Kabupaten Tanggamus khususnya dan di Lampung pada umumnya.

## KAJIAN PUSTAKA

Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kemandirian industri pertahanan dan pengembangan industri pertahanan. Apabila dibawa ke dalam konteks pertahanan negara, kemandirian berarti kemampuan negara mencukupi sendiri persenjataannya tanpa bergantung dari negara lain dan mampu menciptakan teknologi Alutsista yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan aktual (Rianto, 2017). Kemandirian perlu ditingkatkan pada tahap kemandirian perawatan dan kemandirian produksi. Kemandirian dalam perawatan akan memastikan seluruh Alutsista yang pengadaannya berasal dari luar negeri dapat tetap berfungsi tanpa dikhawatirkan kemungkinan embargo. Sedangkan kemandirian produksi merupakan pencapaian dimana suatu negara mampu membuat dan memproduksi sendiri persenjataannya (A. Wijayanto & Edy Prasetyo, Makmur Keliat, 2012).

Tulisan Richard A. Bitzinger yang berjudul "*Toward a Brave New Arms Industry?*" dilandasi oleh munculnya fenomena negara-negara *second-tier arms producer* yang sedang berusaha membangun dan mengembangkan industri pertahanan untuk mewujudkan kemandirian. Masalah yang menjadi penghambat dalam pengembangan industri pertahanan di negara-negara berkembang yang dikemukakan oleh Bitzinger adalah adanya batas dan jarak yang jauh antara negara *first-tier* dan *second-tier*. Negara-negara *second-tier* seperti Israel, Taiwan, Indonesia, dan Korea Selatan masih sulit untuk keluar dari zona tingkat produksi industri kedirgantaraan. Negara-negara tersebut belum mengarah pada produk yang berbasis militer. Mereka masih berorientasi pada produk sipil (Bitzinger, 2003: 64-66).

Sementara pengembangan industri pertahanan adalah serangkaian kegiatan terhadap penguasaan teknologi untuk mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang berdaya tangkal, modern, tangguh, serta dinamis. Posisi tawar dalam penguasaan teknologi pertahanan akan terangkat melalui penguasaan teknologi industri pertahanan. Salah satu elemen dalam sistem pertahanan adalah dibutuhkannya ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (apalhankam) serta didukung dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri (Rianto, 2017).

Model pengembangan industri pertahanan yang dipilih oleh negara merupakan penyesuaian dari potensi dan keadaan industri pertahanannya. Negara memetakan hambatan yang berpotensi atau yang tengah dialami, sehingga nantinya sebuah negara dapat menerapkan model yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan. Terdapat 3 model yang sering menjadi acuan negara untuk mengembangkan industri pertahanan di dalam lingkup industri pertahanan global. Tiga model tersebut adalah *autarky model*, *niche-production model* dan *global supply chain model* (Lim, 1983: 377-384).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dari berbagai sumber berupa data primer dan data sekunder. Data utama berupa fakta, informasi, dokumen-dokumen, dan opini atau pandangan dan harapan yang diperoleh dari institusi yang terlibat dalam situasi yang diteliti. Pengumpulan data utama menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan Lampung yang direncanakan akan menjadi pusat industri pertahanan nasional meliputi kesiapan pemerintah, masyarakat, maupun wilayah geografisnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesiapan Wilayah Tanggamus dalam Rencana Relokasi Industri Pertahanan**

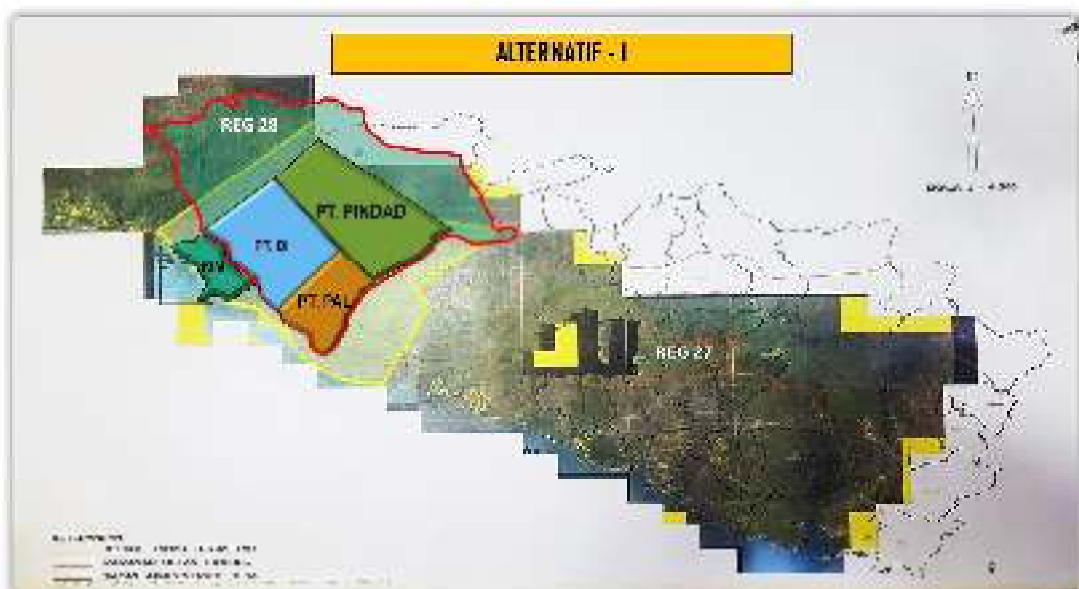
Berdasarkan wawancara dengan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tanggamus pada Oktober 2019, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyarankan dua wilayah yang dapat dijadikan tempat relokasi dari ketiga industri pertahanan milik negara, yaitu PT. Pindad, PT Dirgantara, dan PT. PAL. Wilayah yang dimaksud adalah register 27 dan register 28. Register 27 berada di daerah Pematang Sulah sedangkan register 28 berada di Pematang Neba. Register 27 dan 28 dipilih karena wilayahnya yang berdekatan dengan Kawasan Industri Maritim (KIM) yang terlebih dahulu telah direncanakan sebelumnya.

Dengan wilayah yang berdekatan maka Pemerintah Pusat (Kementerian Pertahanan) maupun Pemerintah Kabupaten Tanggamus berharap bahwa KIM dan

industri pertahanan dapat bekerja secara berkesinambungan di lokasi tersebut. Jika terealisasi, maka penyatuan KIM dan industri Pertahanan tersebut akan memiliki satu nama saja yakni Kawasan Industri Tanggamus, Lampung.

Dari rencana penyatuan tersebut terdapat dua alternatif. Alternatif pertama adalah kawasan KIM dan industri pertahanan dapat disatukan pada register 28. Sedangkan alternatif kedua adalah kawasan KIM dan industri pertahanan disatukan pada register 27. Hal tersebut masih dalam perencanaan dan kemungkinan masih dapat berubah di masa yang akan datang.

Gambar 1. Alternatif Pertama Penyatuan KIM dan industri pertahanan



Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, Oktober 2019

Gambar 2. Alternatif Kedua Penyatuan KIM dan industri pertahanan



Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, Oktober 2019.

Kedua register tersebut, seperti yang ditunjukkan pada gambar, merupakan kawasan hutan lindung yang dinaungi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diperlukan pengubahan status dari hutan lindung menjadi hutan produksi agar kedua register dapat dijadikan tempat relokasi industri pertahanan yang baru. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mengusahakan untuk mengubah status hutan lindung tersebut menjadi hutan produksi dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun karena prosesnya yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, hingga bulan Oktober 2019 saat peneliti melakukan wawancara, kedua register tersebut masih berstatus sebagai hutan lindung.

Selain pengubahan status dari hutan lindung menjadi hutan produksi, berdasarkan hasil *Feasibility Study* (FS) yang dilakukan peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil mengungkapkan bahwa tidak semua dari ketiga industri pertahanan (PT DI, PT PAL, dan PT Pindad) tersebut cocok untuk dibangun di kedua register. Hasil *Feasibility Study* yang dilakukan menunjukkan bahwa pembangunan PT. Pindad dan PT. PAL dapat dilakukan sementara pembangunan PT DI tidak bisa dilakukan di wilayah tersebut.

Wilayah daratan yang luas di register 27 dinilai cocok untuk melakukan ujicoba senjata maupun peluru milik PT. Pindad. Lautan yang dalam dan tenang di sepanjang garis pantai register 28 cocok untuk dijadikan sebagai industri pembuatan kapal selam dan juga galangan kapal. Sedangkan kedua wilayah register tidak cocok untuk dijadikan lokasi PT. DI dikarenakan luasnya yang tidak mencukupi kebutuhan akan ratusan ribu hektare yang diperlukan sebagai landasan pacu ujicoba pesawat. Dibutuhkan setidaknya 150.000 hektare lahan bagi PT. DI agar dapat berjalan secara optimal, sedangkan lahan yang tersedia hanyalah 3.000 hektare saja.

Gambar 3. Lokasi register 27 dan 28 yang merupakan kawasan hutan lindung  
(luas 3000 hektare)



Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, Oktober 2019.

Hasil dari *Feasibilty Study* juga mengungkapkan bahwa kedua register tersebut memiliki potensi gempa bumi yang kecil. Kedua register tersebut tidaklah dilalui sesar atau pertemuan lempeng bumi yang dapat menimbulkan gempa bumi. Namun demikian hasil FS tersebut menyarankan bahwa diperlukannya konstruksi tahan gempa agar industri dapat tetap bertahan walaupun terkena gempa bumi. Hasil dari FS tersebut juga menambahkan bahwa diperlukannya pembukaan akses jalan agar pendistribusian produk maupun akses jalan bagi tenaga kerja dapat terbuka dan berjalan dengan lancar.

Adanya pembangunan industri pertahanan di Tanggamus ini akan mengubah tata ruang Kabupaten Tanggamus yang telah ada. Namun demikian perubahan tersebut masih mengacu kepada Permendagri No. 116 tahun 2017 mengenai Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta pelaksanaannya dibantu oleh Bappelitbang (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan) Kabupaten Tanggamus. Tantangan dalam melanjutkan rencana pembangunan ini adalah pembebasan tanah adat milik warga. Tanah adat atau sebutan lainnya

adalah tanah marga merupakan tanah yang diwariskan secara turun temurun di sebuah keluarga.

### **Kesiapan Pemerintah dalam Rencana Relokasi Industri Pertahanan**

Pembangunan industri pertahanan di Tanggamus menuntut kesiapan dari pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah. Pada tingkat pemerintah pusat, kesiapan tersebut ditunjukkan dengan datangnya Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang menjabat saat itu, yaitu Ryamizard Ryacudu, ke Provinsi Lampung. Kedatangan Menteri Pertahanan yang dilakukan pada tahun 2017 tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan rencana pembangunan industri pertahanan di Tanggamus. Sosialisasi tersebut dilakukan kepada pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, hingga ke tingkat camat di Limau, Cukuh Balak, dan Kota Agung Timur. Selain melakukan sosialisasi di tingkat pemerintahan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu turut meminta izin dan mensosialisasikan rencana pembangunan industri pertahanan tersebut kepada para tokoh adat di daerah setempat.

Berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu merupakan upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan rencana pembangunan industri pertahanan di Tanggamus serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya mewujudkan produksi alat-alat sistem pertahanan di Indonesia yang mandiri dan tidak bergantung kepada bantuan pihak asing. Kemandirian tersebut hendak diwujudkan melalui pembangunan kapal selam ke-4 dan ke-5 yang diharapkan tidak lagi menjadi proyek bersama antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Untuk saat ini kapal selam yang dimiliki Indonesia berasal dari luar negeri ataupun pembuatannya masih dilakukan dengan bantuan negara lain. Selain kemandirian dari produksi alat-alat sistem pertahanan, rencana pembangunan industri pertahanan di Tanggamus juga diharapkan dapat membuat citra produk-produk militer maupun komersil buatan Indonesia juga tidak kalah kualitasnya dengan produk dari negara-negara lain.

Pada tingkat pemerintah daerah, kesiapan tersebut ditunjukkan melalui kerjasama yang dibangun dengan berbagai mitra yang tujuannya untuk

mendukung tercapainya rencana tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah membangun kerjasama dengan berbagai mitra, di antaranya:

- Perusahaan Listrik Negara. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah bekerjasama dengan PLN dalam hal pembangunan Tanggamus *electric power* yang tujuannya adalah memberikan serta mendistribusikan pasokan listrik ke industri pertahanan.
- Perusahaan Telekomunikasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan akses komunikasi bagi para pekerja yang banyak berasal dari luar Provinsi Lampung.
- Perusahaan Daerah Air Minum Daerah di Tanggamus. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk memberikan akses air bersih ke industri pertahanan.
- PT. Repindo Jaya. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk memberikan akses air minum kepada para pekerja industri pertahanan.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk membangun akses jalan ke Kawasan industri pertahanan dan juga menyediakan tempat tinggal bagi para pekerja yang berasal dari luar Provinsi Lampung.
- Peneliti dari Institut Teknologi Bandung. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kesiapan lahan yang hendak digunakan sebagai tempat pembangunan industri pertahanan.
- Universitas Pertahanan (UNHAN). Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk meneliti bentuk wilayah yang hendak digunakan. Dalam hal ini UNHAN memberikan hasil pemindaian dari satelit.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bappelitbang Kabupaten Tanggamus pada Oktober 2019, disebutkan bahwa selain bekerjasama dengan berbagai mitra yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga mengatakan bahwa pihaknya akan siap membantu dalam hal pendanaan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui mandat yang diberikan oleh Bupati Tanggamus, bersedia untuk memberikan sokongan dana sebesar 10%<sup>8</sup> dari keseluruhan proyek pembangunan tersebut. Dari segi infrastruktur, Pemerintah

Kabupaten Tanggamus telah menyiapkan pengubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional bagi jalan sepanjang 16.1 km yang mengarah ke lokasi industri tersebut.

Namun terdapat tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yaitu kurangnya dukungan politik dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Tanggamus hanya mendapat dukungan dari anggota DPR-RI. Dukungan itu pun masih bersifat spasial, yakni hanya beberapa anggota DPR-RI yang merupakan putra daerah Lampung dan Tanggamus saja yang meyuarkan dukungannya.

### **Kesiapan Penduduk (Masyarakat Sekitar) dalam Rencana Relokasi Industri Pertahanan**

Penduduk di Kabupaten Tanggamus menyatakan sikap dukungannya terhadap rencana relokasi dan pembangunan industri pertahanan ini. Penduduk di Kabupaten Tanggamus berharap akan banyak dari putra-putri daerah setempat yang dapat bekerja di lokasi industri pertahanan yang hendak dibangun tersebut. Selain itu, penduduk juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan tanahnya (tanah marga) dengan syarat mereka harus mendapatkan ganti rugi atas tanah tersebut. Tanah yang dimiliki penduduk di wilayah tempat pembangunan tersebut memiliki luas sekitar 350 hektare.

Kesiapan penduduk di sekitar lokasi pembangunan industri pertahanan di Tanggamus juga dapat dilihat melalui kesiapannya untuk menghadapi dampak yang ditimbulkan dari industri pertahanan tersebut terhadap lingkungan. Karena jika pembangunan dari industri pertahanan tersebut merusak lingkungan atau mengubah ekosistem yang ada, penduduk juga akan terkena akibatnya. Untuk penanganan limbah dan polusi yang sifatnya adalah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun), pemerintah telah menyiapkan tempat pembuangan dan pengolahan limbah di daerah Pugung. Daerah tersebut telah memenuhi syarat pembangunan dan pengoperasiannya yakni minimal sejauh 2 km dari pemukiman penduduk.

Dari segi ketersediaan air, biodiversitas tanaman juga perlu diperhatikan. Dengan adanya air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan adanya biodiversitas tanaman yang melimpah, maka kehidupan penduduk dapat lebih terjamin. Hal tersebut juga telah diperkuat dengan hasil *Feasibility Study* dari

Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

**Gambar 4. Hasil *feasibility study* Tim Peneliti ITB dalam Aspek**

Lingkungan			
Biodiversitas	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat
sumber air bersih	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat
Keberadaan dan Kualitas Badan Air Penerima	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat
Pengelolaan Limbah B3	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat
Pengelolaan Sampah Non B3	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat
Kualitas Air Laut	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat	Layak dengan syarat

#### Lingkungan

Sumber: *Feasibility Study* Relokasi Kawasan Industri Pertahanan Di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 2019, Institut Teknologi Bandung. Data diberikan oleh Bappelitbang Kabupaten Tanggamus saat wawancara langsung pada Oktober 2019

Dari bagan hasil *feasibility study* di atas nampak bahwa berbagai aspek lingkungan yang dapat mendukung industri pertahanan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya dituliskan dengan keterangan “layak dengan syarat”. Artinya adalah segala aspek di atas dapat dipenuhi jika pemerintah atau badan yang berperan di dalamnya telah membangun infrastruktur atau telah mengusahakan keberadaan dari aspek-aspek tersebut.

#### SIMPULAN

Pengembangan industri pertahanan di dalam negeri merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional, terutama dalam hal kemandirian industri pertahanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan merelokasi sejumlah industri strategis di bidang pertahanan ke wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kesiapan wilayah, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyarankan dua wilayahnya, yakni register 27 dan 28 sebagai lokasi pembangunan industri pertahanan. Kedua wilayah tersebut dapat digunakan untuk membangun PT.

Pindad dan PT. PAL namun tidak cocok untuk membangun PT. Dirgantara Indonesia. Dari segi kesiapan pemerintah, pemerintah pusat telah mensosialisasikan rencana tersebut ke pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, hingga ke tingkat camat dan desa di Tanggamus. Pemda Kabupaten Tanggamus telah bekerjasama dengan berbagai mitra untuk mendukung tercapainya rencana pembangunan industri pertahanan di Tanggamus. Sementara dari segi kesiapan penduduk, masyarakat menyatakan sikap positifnya terhadap rencana pembangunan tersebut dengan syarat bahwa tanah adat milik mereka diganti rugi oleh pemerintah. Selain itu kesiapan penduduk telah didukung melalui kondisi lingkungan yang baik.

Dengan adanya pengembangan industri pertahanan di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka diharapkan industri tersebut dapat dilipatgandakan kemampuan produksinya, ditingkatkan kualitas produk-produk keluarannya, serta dapat menjadi lebih mandiri. Dengan kemampuan produksi yang berkembang, kualitasnya baik, serta lebih mandiri maka visi Kemenhan yang ingin mewujudkan pertahanan yang tangguh dapat tercapai. Produk-produk dari industri pertahanan itupun dapat digunakan untuk mewujudkan misi Kemenhan yang ingin menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bitzinger, Richard A. 2003. *Towards a Brave New Arms Industry*. Adelphi Papers. London: Routledge.
- Institut Teknologi Bandung. (2019). *Feasibility Study Relokasi Kawasan Industri Pertahanan Di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung 2019*.
- Lim, David. (1983). Another Look at Growth and Defense in Less Developed Countries. *Economic Development and Cultural Change*. University of Chicago Press, vol. 31(2), pages 377-384, January.
- Rianto, Mochamad Setiadiono (2017). Peningkatan Peran Pt Daya Radar Utama Dalam Pembangunan Kri Jenis Angkut Tank Guna Mendukung Terwujudnya Kemandirian Industri Pertahanan. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semester*, Desember 2017, Vol. 3, No. 3, Universitas Pertahanan
- Wawancara langsung dengan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tanggamus pada Oktober 2019
- Wijayanto. A. & Edy Prasetyo, Makmur Keliat. (2012). *Dinamika Persenjataan*

dan Revitalisasi Industri Pertahanan. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).